



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 162 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

ms

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 730);
6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 101 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur pemerintahan pilihan di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

m q

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra-PD.
14. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
16. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Dinas setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029;
- b. sebagai panduan pelaksana teknis kegiatan dan subkegiatan prioritas pembangunan daerah, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkat pemerintahan; dan
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Sistematika Rencana Kerja Dinas meliputi:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
dan

BAB V : Penutup.

(2) Rencana Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi unit organisasi yang terdiri atas:

- a. unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. unsur pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Perbibitan Ternak dan Pakan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Sarana Prasarana Peternakan dan Pengawasan Izin Usaha Peternakan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

u q

3. Bidang Bidang Kesehatan Hewan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III PERUBAHAN RENJA-PD

Pasal 6

- (1) Perubahan Rencana Kerja Dinas dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

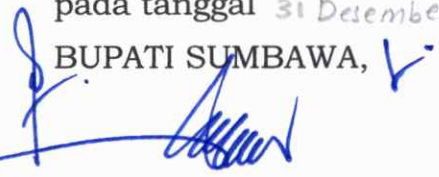
BAB IV KETENTUAN PENUTUP

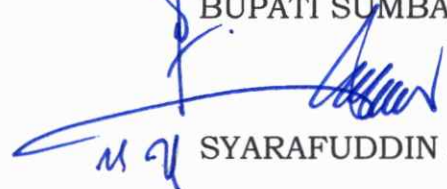
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI SUMBAWA, 

 SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 162

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 162 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-PD disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Terkait dengan posisi atau kedudukan dan fungsi, Renja-PD merupakan salah satu dokumen perencanaan perencanaan PD, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan daerah dan rencana PD. Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); RPJMD; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan dokumen perencanaan PD, terdiri atas Renstra-PD dan Renja-PD. Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD.

Rencana Kerja (RENJA) memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan sub sektor peternakan selama setahun ke depan yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen dinas yang harus dilaksanakan secara konsisten. Tahun 2026 merupakan masa kepemimpinan tahun kedua atas kebijakan pemimpin periode 2025-2029 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa 2025-2029.

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 difokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang mendukung ketahanan pangan dengan mengoptimalkan peningkatan ketersediaan prasaranan prasarana

peternakan, Penurunan kejadian dan jumlah kasus hewan Menular, peningkatan penanganan areal yang terdampak wabah penyakit ternak dan peningkatan jumlah pelaku Usaha subsektor Peternakan yang berizin, serta peningkatan nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sumbawa. Program dan kegiatan tahun 2026.

Berdasarkan ketentuan Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja-PD disusun melalui proses beberapa tahapan, sebagai berikut:

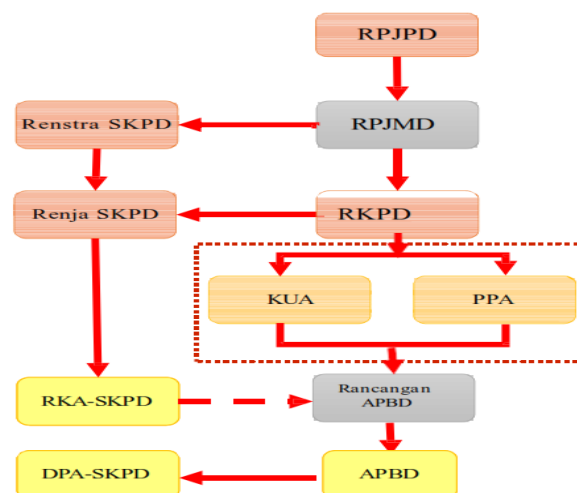
- 1) Tahapan Persiapan Penyusunan Renja-PD, dengan Proses :
 - a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja-PD;
 - b. orientasi mengenai Renja-PD;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja-PD;
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- 2) Tahapan Penyusunan Ranwal Renja-PD, dengan proses:
 - a. PD menyusun ranwal Renja-PD paling lambat minggu pertama bulan Desember;
 - b. Penyusunan rancangan awal Renja-PD berpedoman pada Renstra-PD, hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun berjalan,
 - c. berpedoman pada Renstra-PD bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja-PD dengan Renstra-PD;
 - d. berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja-PD dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra-PD;
 - e. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup: analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - f. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: pendahuluan; hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan penutup;
 - g. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
 - h. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD;

- i. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA dalam forum PD/lintas PD.
- 3) Tahapan Penyusunan Rancangan Renja-PD, dengan proses:
- a. Penyusunan rancangan Renja-PD merupakan proses menyempurnakan ranwal Renja-PD berdasarkan SE Bupati tentang penyusunan rancangan Renja-PD;
 - b. Rancangan Renstra-PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD;
 - c. Rancangan Renja-PD disajikan dengan sesuai standar sistematika;
 - d. Rancangan Renja-PD disampaikan oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD;
 - e. Penyampaian Rancangan Renja-PD paling lambat minggu ketiga bulan Maret;
 - f. BAPPEDA diharuskan melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja-PD, untuk dapat menjamin rancangan Renja-PD sudah selaras dengan rancangan awal RKPD;
 - g. Apabila berdasarkan hasil verifikasi, ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja-PD kepada PD;
 - h. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan tersebut, kepala PD menyempurnakan Rancangan Renja-PD;
 - i. Rancangan Renja-PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA;
 - j. Verifikasi rancangan Renja-PD dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja-PD kepada BAPPEDA.
- 4) Tahapan Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD, dengan proses:
- a. Forum PD/lintas PD dilaksanakan oleh kepala PD berkoordinasi dengan BAPPEDA.
 - b. Forum PD/lintas PD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD.
 - c. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renja-PD.
 - d. Forum PD/lintas PD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima;
 - e. Hasil pembahasan rancangan Renja-PD dalam forum PD/lintas PD, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum PD/lintas PD.
- 5) Tahapan Perumusan Rancangan Akhir Renja-PD, dengan proses:
- a. Perumusan rancangan akhir Renja-PD, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja-PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD;
 - b. Perumusan rancangan akhir Renja-PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan PD berdasarkan strategi,

arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Persaturan Bupati tentang RKPD.

- c. Rancangan akhir Renja-PD disajikan sesuai dengan sistematika.
- 6) Penetapan Renja-PD, dengan proses:
 - a. Rancangan akhir Renja-PD, disampaikan kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi;
 - b. Rancangan akhir Renja-PD, disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan;
 - c. Verifikasi yang dilakukan BAPPEDA, harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja-PD selaras dengan peraturan Bupati tentang RKPD dan Renja-PD lainnya;
 - d. Apabila hasil verifikasi, ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renja-PD kepada kepala PD dan kepala PD harus melakukan penyempurnaan berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA;
 - e. Rancangan akhir Renja-PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA.
 - f. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja-PD, paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja-PD;
 - g. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja-PD yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - h. Penetapan Renja-PD, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.
 - i. Renja-PD menjadi pedoman PD dalam menyusun RKA PD.

Tahapan dan proses penyusunan Renja-PD diatas menunjukkan hubungan dan keterkaitan Renja-PD dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra-PD, RPJPD, RPJMD, RKPD dan Restra-PD, seperti pada gambar di bawah ini:



Selain memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan PD dan dokumen perencanaan daerah (kabupaten), Renja-PD juga memiliki keterkaitan

- Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 17) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 22) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang RPJP Kabupaten Sumbawa 2005-2025;
 - 23) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
 - 24) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 25) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
 - 26) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
 - 27) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 72 Tahun 2020 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pembuatan Rencana Kerja ini yaitu :

- a. sebagai dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan PD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-PD dan RKPD.
- b. menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- c. memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana dalam merumuskan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan pembangunan di sektor peternakan mendukung peningkatan populasi ternak dalam menunjang peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa mengacu pada upaya tersebut. Kegiatan pembangunan tersebut ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan periode 2021-2026 yang telah menetapkan sasaran sasaran yaitu: 1. meningkatnya laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha prioritas dengan indikator tujuan yaitu Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha sektor Pertanian subsektor Peternakan, 2. Meningkatkan nilai reformasi birokrasi dalam pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator tujuan meningkatnya kualitas reformasi birokrasi.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Setelah diketahui nilai realisasi dari suatu indikator kinerja, maka akan diketahui nilai capaian dari masing-masing indikator kinerja dengan membandingkan nilai realisasi dengan nilai target dan dijadikan dalam bentuk persentase (%). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh angka Nilai Kinerja sebagai postur kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa yang merupakan capaian kinerja Tahun 2024, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

a. Capaian Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024

Capaian realisasi anggaran pada program, kegiatan, dan subkegiatan tahun anggaran 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Capaian realisasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan

NO		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	%
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.972.644.121	11.889.974.552	99,31
	A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	52.924.196	52.240.160	98,71
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan PD	9.853.000	9.805.000	99,51
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2.558.025	2.479.800	96,94
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	478.000	468.000	97,91

NO		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	%
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2.737.000	2.646.000	96,68
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	720.960	714.960	99,17
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.065.000	2.010.000	97,34
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja PD	34.512.211	34.116.400	98,85
	B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.340.767.875	10.293.554.381	99,54
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10.253.260.475	10.206.448.181	99,54
	9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.498.500	77.306.000	99,75
	10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.451.400	3.355.000	97,21
	11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	6.557.500	6.445.200	98,29
	C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi BMD pada PD	1.195.000	1.155.000	96,65
	12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Rekonsiliasi dan Penyusunan Lap BMD pada SKPD	1.195.000	1.155.000	96,65
	D	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.732.500	1.096.000	63,26
	13	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.732.500	1.096.000	63,26
	E	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.225.000	1.205.000	98,37
	14	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.225.000	1.205.000	98,37
	F	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.588.000	68.182.572	99,41
	15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.202.000	1.194.000	99,33
	16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.386.000	66.988.572	99,41
	G	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dok Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	597.659.950	596.040.150	99,73
	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	597.659.950	596.040.150	99,73
	H	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.033.500	687.827.245	97,01

NO		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	%
	18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.210.500	12.717.500	96,27
	19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	207.000.000	203.091.845	98,11
	20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	488.823.000	472.017.900	96,56
	I	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.518.100	188.674.044	94,56
	21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	199.518.100	188.674.044	94,56
	II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Kelompok Tani yang mendapatkan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	5.872.029.244	5.323.819.100	90,66
	J	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	227.196.194	226.961.200	99,90
	22	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	227.196.194	226.961.200	99,90
	K	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	14.024.500	13.693.500	97,64
	23	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	14.024.500	13.693.500	97,64
	L	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak	5.630.808.550	5.083.164.400	90,27
	24	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	19.729.000	18.875.000	95,67
	25	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	5.611.079.550	5.064.289.400	90,26
	III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat ketersediaan prasarana peternakan sesuai standar	10.255.490.000	10.004.085.500	97,55
	M	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana peternakan	10.245.415.000	9.994.030.500	97,55
	26	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10.245.415.000	9.994.030.500	97,55
	N	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	10.075.000	10.055.000	99,80
	27	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Laporan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	10.075.000	10.055.000	99,80
	IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	3.573.850.325	3.399.368.095	95,12
	O	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	44.205.250	42.042.000	95,11
	28	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	44.205.250	42.042.000	95,11

NO		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	%
	P	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	3.477.093.975	3.305.121.095	95,05
	29	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	90.285.975	85.051.700	94,20
	30	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3.386.808.000	3.220.069.395	95,08
	Q	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laporan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis	52.551.100	52.205.000	99,34
	31	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	36.063.700	35.850.100	99,41
	32	Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	16.487.400	16.354.900	99,20
IV		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat kepatuhan perizinan pelaku usaha subsektor peternakan (PUSSP) yang berizin	13.008.572	12.764.500	98,12
	R	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	11.365.000	11.176.500	98,34
	33	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah laporan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	5.976.500	5.908.500	98,86
	34	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah laporan Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	5.388.500	5.268.000	97,76
	S	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Laporan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	1.643.572	1.588.000	96,62
	35	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Laporan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	1.643.572	1.588.000	96,62
JUMLAH				31.687.022.262	30.630.011.747	96,66

b. Capaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024

Pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Sumbawa tahun 2024 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan periode 2021-2026 yang telah menetapkan sasaran sasaran yaitu: 1. meningkatnya laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha prioritas dengan indikator tujuan yaitu Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha sektor Pertanian subsektor Peternakan, 2. Meningkatkan nilai reformasi birokrasi dalam pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator tujuan meningkatnya kualitas reformasi birokrasi.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Setelah diketahui nilai realisasi dari suatu indikator kinerja, maka akan diketahui nilai capaian dari masing-masing indikator kinerja dengan membandingkan nilai realisasi dengan nilai target dan dijadikan dalam bentuk persentase (%). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut,

diperoleh angka Nilai Kinerja sebagai postur kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa yang merupakan capaian kinerja Tahun 2024, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Indikator Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa, Realisasi dan Rasio Capaian Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Populasi Ternak	Laju pertumbuhan populasi ternak (%)	2	3,07	153,5%
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Peningkatan kategori nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	A	A	80,90

Berdasarkan pengukuran kinerja pada Tabel 12 di atas, dapat dikatakan pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa tahun 2024 sesuai kreteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi dan memenuhi target kinerja.

Selengkapnya capaian kinerja masing-masing sasaran strategis disampaikan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Populasi Ternak
 - a. Capaian Kinerja Tahun 2024

Tabel 2.3 Data Populasi Ternak Tahun 2023-2024

JENIS TERNAK		TAHUN	
		2023	2024
TERNAK BESAR	SAPI	305.866	307.552
	KERBAU	31.302	29.192
	KUDA	12.592	11.841
TERNAK KECIL	KAMBING	23.340	22.122
	DOMBA	443	786
	BABI	5.365	1.541
TERNAK UNGGAS	AYAM PEDGG	572.315	584.724
	AYAM PETLR	30.046	22.850

JENIS TERNAK		TAHUN	
		2023	2024
	AYAM BURAS	604.337	652.901
	ITIK	5.663	6.612
Jumlah (ekor)		1.591.269	1.640.121
Pertumbuhan (%)			3,07

Pertumbuhan populasi ternak merupakan peningkatan populasi (sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras dan itik) pada tahun 2024. Berdasarkan tabel diatas, Peningkatan populasi ternak capaian kinerja pada Tahun 2024 adalah 3,07 %, melampaui target pertumbuhan ternak sebesar 2 %

2. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Nilai SAKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik, penilaian SAKIP meliputi lima komponen, yaitu perencanaan kinerja; pengukuran kinerja; pelaporan kinerja; evaluasi internal; dan capaian kinerja. Penilaian SAKIP inilah yang akan menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun yang akan datang sehingga diharapkan pada tahun selanjutnya terjadi Peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil dan pada akhirnya nilai SAKIP dapat meningkat.

Peningkatan katagori nilai SAKIP	
Target : A	Realisasi : A
% Capaian : 100%	
Berhasil	

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator sasaran adalah Peningkatan katagori nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan capaian 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa

1) Sarana Prasarana Peternakan Dan Pengawasan Izin Usaha Peternakan

Bidang sarana prasarana dan izin usaha Peternakan melaksanakan tugas dalam rangka penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Peternakan serta melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha sub sektor peternakan.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengadakan dan/atau merehabilitasi 152 unit sarana prasarana Peternakan yang terdiri dari 64 unit sarana pendukung Peternakan dan 88 unit prasarana Peternakan. Dari 7 rumah potong hewan, yang telah direhab dan dilengkapi sarana pendukungnya sesuai standar teknis hanya 2 RPH. Dari 16 pusat Kesehatan hewan, telah dirahabilitasi sebanyak 11 unit. Secara umum terdapat tren kenaikan pengadaan sarana prasarana tetapi masih terdapat ketimpangan jumlah sarana dan prasarana yang dapat berdampak pada kurang optimalnya penggunaan sarana prasarana Peternakan yang ada.

Sampai tahun 2024, tercatat ada 176 usaha di bidang Peternakan yang telah didampingi untuk mematuhi peraturan legalitas izin usaha peternakan. Tren kenaikan ini juga dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan akan produk komoditas Peternakan dan kesadaran akan Kesehatan Hewan di Kabupaten Sumbawa. Izin usaha yang didampingi paling banyak yaitu usaha pemeliharaan hewan sebanyak 70 unit usaha (39,77%), usaha pemotongan hewan sebanyak 69 unit usaha (39,20%), dan toko obat hewan sebanyak 37 unit usaha (21,02%).

2) Perbibitan Ternak dan Pakan

Bidang Perbibitan Ternak dan Pakan melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya genetik hewan, standarisasi, dan mutu dan produksi benih/bibit ternak, bahan pakan, pakan, dan hijauan pakan ternak serta penjaminan peredaran bibit/benih ternak.

Distribusi ternak atau peredaran bibit ternak yang dilaksanakan terdiri dari ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Komoditi ternak yang paling banyak didistribusikan dalam 5 tahun terakhir yaitu ayam sebesar 67,73% (15.680 ekor), sapi sebesar 19,52% (4.518 ekor), kambing sebesar 10,38% (2.403 ekor), bebek 0,55% (127 ekor), kerbau sebesar 0,53% (122 ekor), itik sebesar 0,39% (90 ekor), dan kuda sebesar 0,39% (50 ekor).

Alokasi anggaran terbanyak dalam 5 tahun terakhir yaitu pada pengadaan sapi dengan total nilai anggaran Rp 32.634.523.000 (78,22% dari total anggaran), diikuti kambing dengan total nilai Rp 5.146.900.000 (12,34%), ayam total nilai Rp 2.351.929.706 (5,64%), kerbau dengan total nilai Rp 1.115.600.000 (2,67%), kuda dengan total nilai Rp 415.900.000 (1,00%), entok dengan total nilai Rp 23.400.000 (0,06%), bebek dengan total nilai Rp 19.000.000 (0,05%), dan itik dengan total nilai anggaran Rp 13.500.000 (0,03%).

3) Kesehatan Hewan

Dalam pelaksanaan fungsi pelayanan di bidang kesehatan hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyediakan 16 pusat Kesehatan hewan (Puskesmas) pada 16 kecamatan. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tercatat ada 16.466 kasus penyakit hewan menular strategis dengan persentase tertinggi yaitu penyakit mulut dan kuku sebesar 77,82% atau sebanyak 12.814 kasus, penyakit rabies sebesar 11,44% atau sebanyak 1.883 kasus, penyakit Septicaemia Epizootica (SE) sebesar 2,74% atau sebanyak 451 kasus, penyakit surra sebesar 0,64% atau sebanyak 106 kasus.

Pada tahun 2021 terjadi penurunan kasus penyakit hewan sebesar -22,58%, tetapi pada tahun 2022 terjadi peningkatan 1.713% yang disebabkan oleh adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 46,34% dibandingkan dengan jumlah kasus PHMS pada tahun 2020. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan kasus penyakit sebesar 107,9% yang diakibatkan oleh tingginya meningkatnya kasus penyakit hewan yang bersifat zoonosis yaitu rabies yang meningkat sebesar 346,90% dibandingkan dengan jumlah kasus rabies pada tahun 2020 (194 kasus) dan tahun 2024 867 kasus.

Rendahnya capaian persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit ternak diakibatkan oleh cakupan pelayanan kesehatan hewan dan pengadaan obat hewan yang terbatas termasuk vaksinasi ternak.

4) Pengiriman Ternak

Pengiriman ternak besar keluar daerah Kabupaten Sumbawa adalah realisasi permintaan yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ke beberapa daerah sebagai mitra bisnis dalam transaksi perdagangan ternak antar pulau yang dilakukan antara pengusaha dari daerah produsen ke daerah konsumen baik dalam bentuk ternak bibit maupun ternak potong.

Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah produsen ternak potong, mendorong perdagangan ternak potong ke luar daerah saat ini berupa ternak hidup, diharapkan ke depan perdagangan dalam bentuk daging karena akan mempunyai dampak yang lebih bagi dinamika ekonomi daerah serta peningkatan pendapatan peternak, selain itu perdagangan dalam bentuk daging dengan sistem stok dapat menutupi stagnasi produksi pada waktu-waktu tertentu. Sebaliknya pada perdagangan ternak hidup akan lebih fluktuatif seperti sekarang ini, mengingat merebaknya kejadian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dll tahun 2022 menghambat arus perdagangan dari daerah produksi ke daerah konsumsi.

5) Kesehatan Masyarakat veteriner

Berdasarkan lokasi pemotongan, jumlah pemotongan tertinggi dalam kurun 5 tahun terakhir yaitu di Rumah Potong Hewan (RPH) Bangkong dengan total pemotongan 12.672 ekor (45,13% dari total pemotongan), disusul RPH Alas dengan jumlah pemotongan 5.815 ekor (20,71%), RPH Plampang dengan jumlah pemotongan 3.327 ekor (11,85%), RPH Lopok jumlah pemotongan

1.898 ekor (6,76%), RPH Utan jumlah pemotongan 1.818 (6,48%), RPH Empang jumlah pemotongan 1.671 ekor (5,95%) dan yang terendah adalah RPH Sabang dengan jumlah pemotongan 876 ekor (3,12%).

Berdasarkan komoditi ternak, ternak yang paling banyak dipotong dalam 5 tahun terakhir adalah sapi sebesar sebanyak 21.603 ekor atau 74,94% dari total pemotongan, kerbau sebanyak 7.078 atau 24,55%, dan kuda sebanyak 145 ekor atau 0,50% dari total jumlah pemotongan.

Jumlah rekomendasi pemasukan bahan asal hewan (BAH) dari tahun 2020-2024 yaitu sebanyak 612 rekomendasi dengan persentase tertinggi yaitu ayam potong segar 38,07% (233 rekomendasi), diikuti oleh telur 22,88% (140 rekomendasi), frozen food 17,97% (110 rekom), ayam potong beku 12,42% (76 rekomendasi), dan susu fermentasi 8,66% (53 rekomendasi). Tingginya pemasukan BAH merupakan usaha pemenuhan kebutuhan pangan dalam daerah dikarenakan produksi dalam daerah masih belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dalam daerah.

Selain melaksanakan kegiatan pengawasan atas peredaran produk hewan, bidang kesmavet juga melaksanakan kegiatan usaha penanggulangan penyebaran penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau disebut juga penyakit zoonosis. Rabies merupakan salah satu penyakit menular strategis yang dapat menular dari hewan ke manusia dan dapat mengancam nyawa. Usaha pencegahan penyebaran dan penularan penyakit rabies salah satunya dilakukan melalui kegiatan vaksinasi dengan target hewan penular rabies (HPR) tervaksin 70% dari total populasi untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity). Target tersebut belum dapat dicapai dikarenakan terbatasnya pengadaan vaksin rabies dan sarana pendukungnya.

Jumlah kejadian kasus rabies dari tahun 2020 sampai 2024 meningkat sebesar 346,90% jumlah persentase penanganan dan penanggulangan rabies melalui kegiatan vaksinasi HPR dengan cakupan hanya 25,81%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan permasalahan dan isu lingkungan dinamis, isu strategis perangkat daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

1. Pertumbuhan populasi ternak belum optimal.
2. Ketersediaan sarana prasarana pendukung peternakan masih rendah
3. Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner tidak optimal.
4. Pengawasan Perizinan pelaku usaha peternakan masih rendah

Tabel 2.4 Masalah strategis sektor peternakan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
a. Pertumbuhan populasi ternak belum optimal	Pencatatan dan pengumpulan data ternak belum optimal	- Cara pengumpulan data ternak melalui registrasi ternak masih manual - Keikutsertaan peternak mendaftar ternak
	Ketersediaan daging ayam dan telur yang belum memadai	- Jumlah peternak unggas relatif masih rendah - Rendahnya produksi daging ayam dan telur dalam daerah - Ketersediaan sarana dan prasarana Peternakan unggas yang masih kurang - Kurangnya intervensi kebijakan pemerintah terhadap peternak unggas
	Pola pemeliharaan ternak tradisional	- peternak masih kurang memprioritaskan usaha ternak yang sifatnya masih sambilan - Peternak hanya mengembangkan ternak seadanya tidak untuk keperluan pasar - sebagai simbol status sosial di dalam masyarakat - sebagai aset atau tabungan untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu ada keperluan uang yang mendesak - Skala usaha kecil
	ketersediaan bibit/bakalan terutama yang bermutu baik atau bibit unggul masih kurang	- pembibitan sapi potong sebagian besar dilakukan oleh usaha peternakan rakyat, kemampuan produksi bibitnya sangat kecil dan keunggulannya tidak terjamin karena sebagian besar memang terjadi secara alamiah - Bisnis pembibitan tidak menarik bagi investor - Terjadi inbreeding/perkawinan sedarah - Akses terhadap Inseminasi Buatan (IB) terbatas - good breeding practice belum dilaksanakan
	kekurangan pakan	- Musim kemarau yang panjang - Masih mengandalkan rumput alam

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Ketersediaan sarana prasana pendukung peternakan masih rendah		- Rendahnya ketersediaan pakan hasil budidaya pakan ternak - Pemanfaatan Limbah pertanian jadi pakan olahan masih rendah
	Keterbatasan sumber daya bagi peternak	- ketrampilan serta motivasi berwirausaha untuk pengembangan usaha peternakan masih kurang - jiwa entrepreneurship yang masih rendah - kemampuan bekerjasama sangat kurang - lulusan sekolah peternakan tidak terjun bekerja ke peternakan - proses regenerasi peternak - kelembagaan Kelompok peternak tidak berjalan
	Keterbatasan Modal	- Belum ada investor dalam budidaya peternak dengan sistem flasma - Akses KUR Peternakan Masih Kurang - Subsidi KUR tidak 100%
	Sarana Prasarana peternakan dan Penunjang yang belum memadai	- Sarana transportasi petugas kurang - Sarana kesehatan hewan - Sarana produksi ternak terbatas - Sarana pengolahan pakan - Irigasi tanah dangkal peternakan - Jalan produksi peternakan - RPH - Puskesmas - Klinik hewan - Laboratorium
	Berkurangnya lahan pengembalaan	- Alih fungsi lahan yang awalnya padang rumput atau dataran terbuka menjadi lahan jagung, - inventarisasi lahan yang potensial untuk pengembangan ternak sapi lengkap dengan peta, kondisi Sarana prasarana yang tersedia termasuk sumber air

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner belum optimal	daya saing produk hewan masih kurang	- akses jejaring pemasaran, inovasi, dan serta Sistem pemasaran (tata niaga) produk hewan belum efektif dan efisien - harga ditingkat peternak tidak jelas - bobot potong yang tidak optimal - Perdagangan hasil ternak keluar daerah masih dalam bentuk ternak hidup
	Kejadian Penyakit hewan yang masih tinggi	- Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan - Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) masih tinggi - Gangguan reproduksi - Pengamatan dan pengamanan penyakit hewan - Pelayanan kesehatan hewan
	Pemotongan ternak ruminansia betina produktif	- Pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif belum optimal - Tidak ada dana talangan dari pemerintah
	Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang belum optimal	- Potensi beredarnya produk hewan tidak ASUH - Kejadian wabah penyakit Zoonosis (rabies) - Pengamanan pos antar daerah Kabupaten - Higiene sanitasi unit usaha peternakan - Pengawasan peredaran produk hewan belum optimal

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian dan usulan oleh masyarakat, terdapat beberapa program yang diusulkan terkait tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa yang meliputi :

- 1) Penyediaan prasarana produksi peternakan seperti sumur, jalan produksi, gudang, unit olahan pakan
- 2) Penyediaan sarana produksi peternakan seperti chopper, mesin pelet, hammer mill, disk mill, penetas telur, dan roda tiga
- 3) Penyediaan bibit ternak untuk meningkatkan kualitas genetik ternak dan mencegah inbreeding
- 4) Pelatihan terkait pengolahan pakan serta kewirausahaan peternakan
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana peternakan unggas
- 6) Penyediaan bibit pakan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai penjabaran arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2020-2024, dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, kebijakan peternakan dan keswan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan. Dalam rangka mewujudkan: visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka Ditjen PKH menetapkan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi, sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan peternakan yang sesuai dengan Good Breeding dan Good Farming Practises.
- 2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan dan Kesehatan hewan
- 3. Pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- 4. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2026 merumuskan tujuan dan sasaran rencana kerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

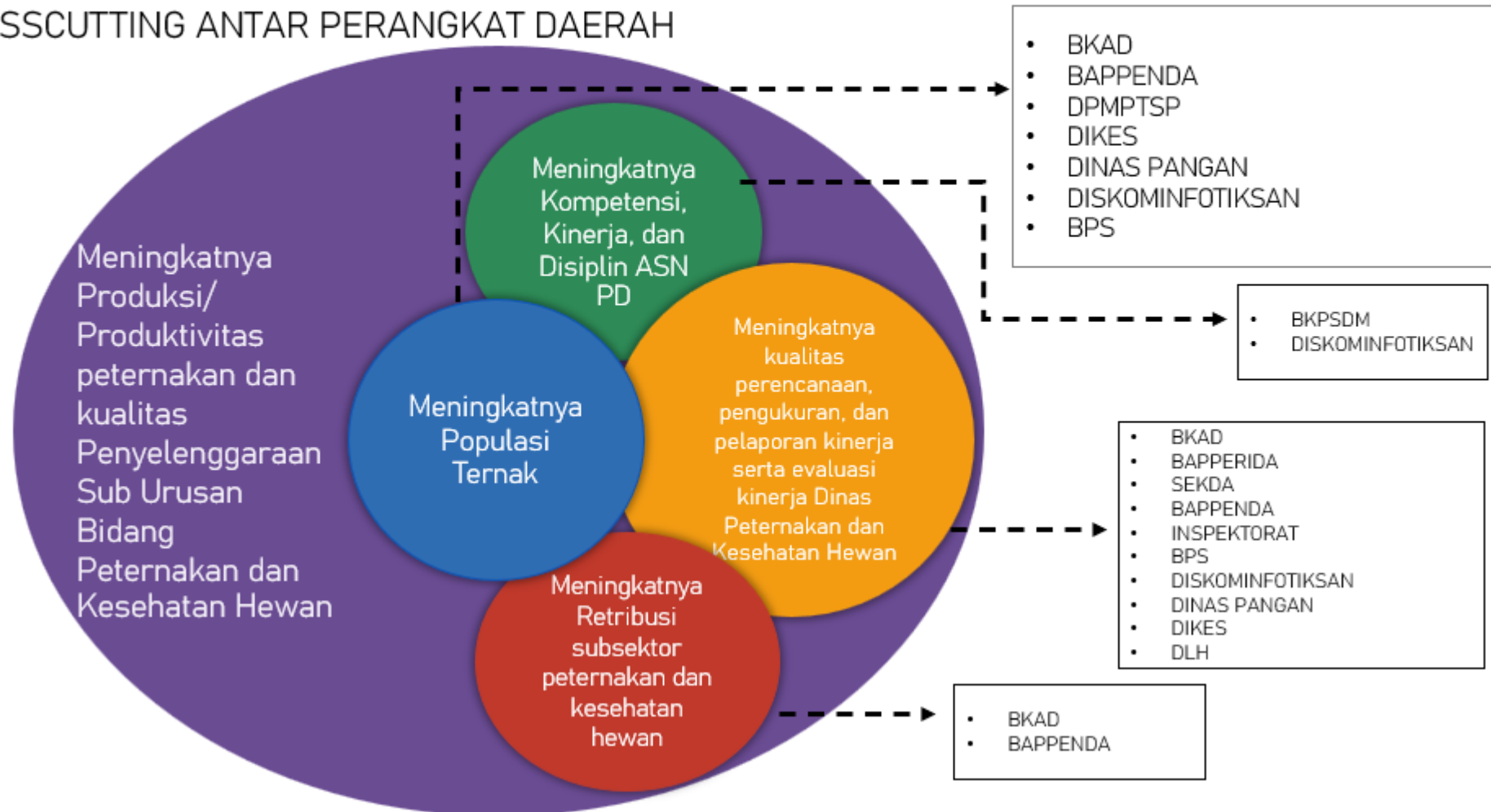
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Produksi/ Produktivitas peternakan dan kualitas Penyelenggaraan Sub Urusan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Meningkatnya populasi ternak	Laju pertumbuhan populasi ternak (%)	3,5%
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kategori AKIP PD (Kategori)	A
		Meningkatnya Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin ASN PD	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	Sedang
		Meningkatnya Retribusi subsektor peternakan dan kesehatan hewan	Proporsi Retribusi sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap retribusi daerah (%)	1,55

Demi terwujudnya tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa merumuskan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 sebagai berikut :

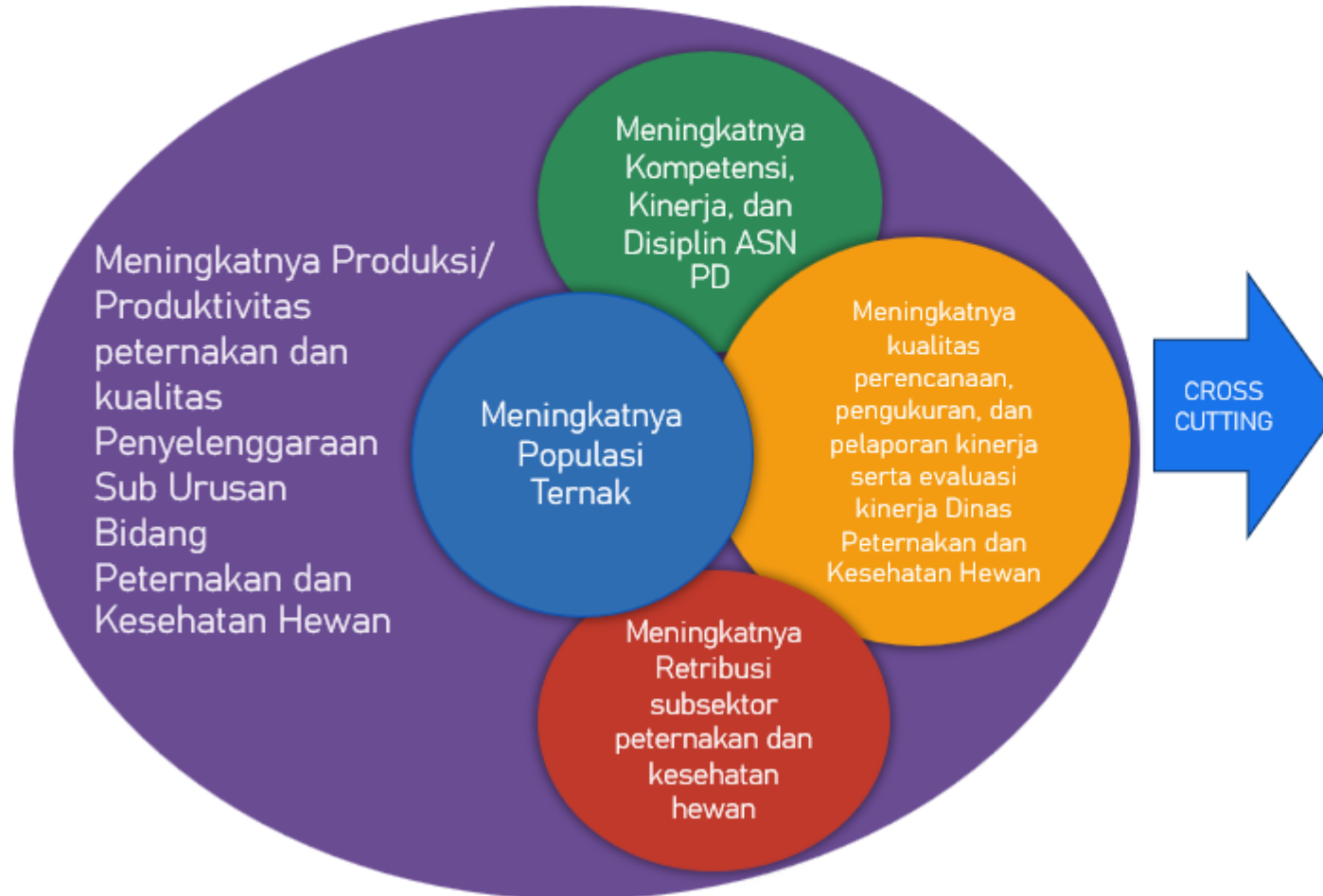
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Perizinan Usaha Pertanian
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Hubungan kinerja, strategi, dan aktivitas antar bidang sesuai dengan tugas dan fungsi nya divisualisasikan melalui grafik crosscutting berikut :

CROSSCUTTING ANTAR PERANGKAT DAERAH

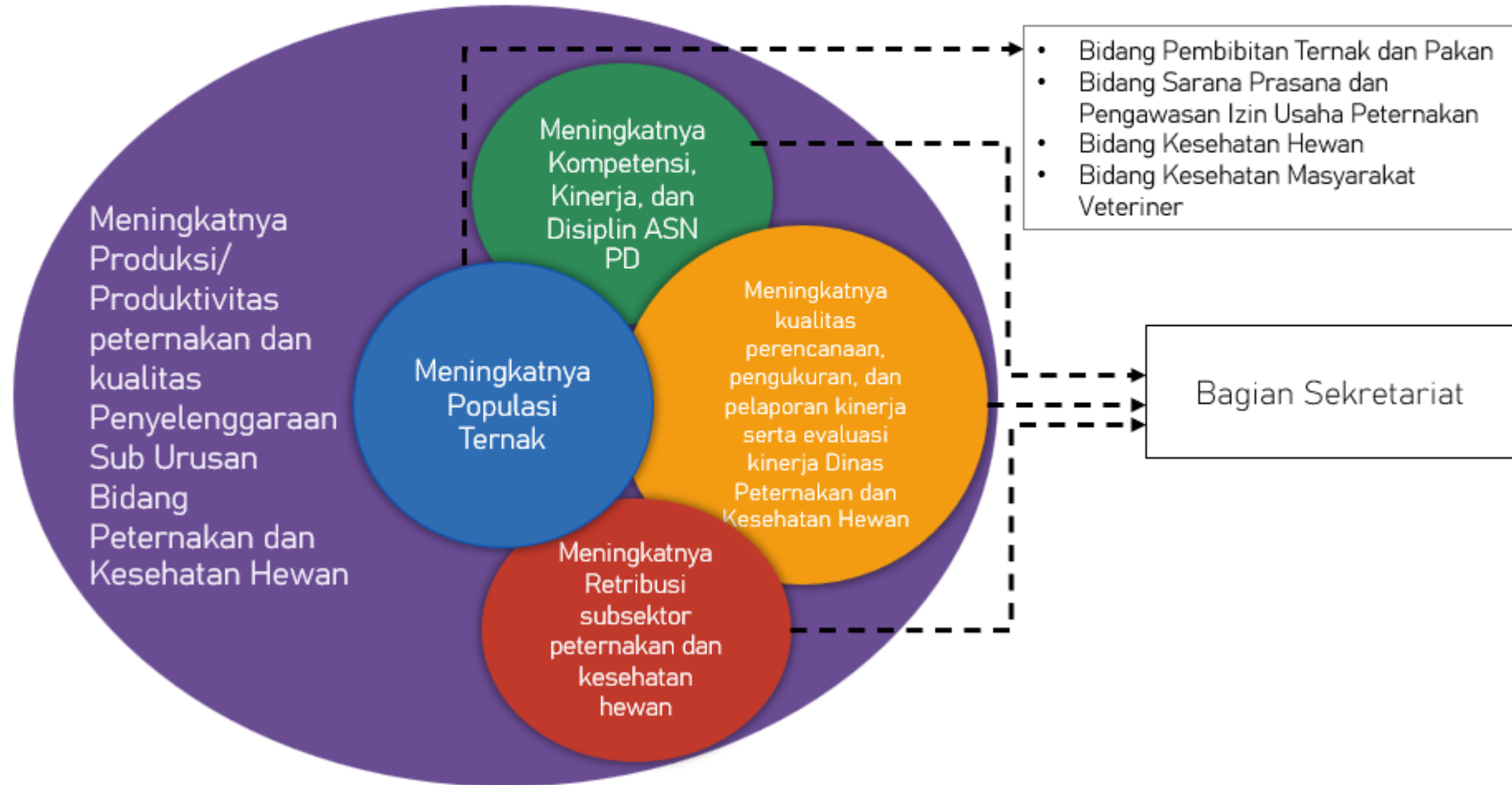


CROSSCUTTING ANTAR PERANGKAT DAERAH



- **BKAD**
Pengelolaan Keuangan Daerah
- **BKPSDM**
Pengukuran Kinerja, Kompetensi, dan Disiplin Pegawai
- **SEKDA**
Kebijakan bidang hukum, perekonomian dan Pembangunan, LPPD/LKPJ
- **BAPPERIDA**
Perumusan Perencanaan Pembangunan daerah
- **BAPPENDA**
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
- **INSPEKTORAT**
Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi, penyelenggaraan pengawasan, evaluasi SAKIP
- **BPS**
Data Kinerja Sektor Peternakan
- **DISKOMINFOTIKSAN**
Satu Data Indonesia, Pelatihan Kompetensi Digital Melalui KOMDIGI
- **DINAS PANGAN**
Neraca Pangan
- **DINKES**
Penanganan Stunting, penyakit hewan zoonosis
- **DLH**
Penanganan Dampak Sektor Peternakan Terhadap Lingkungan
- **DPMPTSP**
Izin lalu lintas ternak

CROSSCUTTING ANTAR BIDANG PENGAMPU PADA PERANGKAT DAERAH



CROSSCUTTING ANTAR BIDANG PADA PERANGKAT DAERAH



- **BAGIAN SEKRETARIAT**

Penyusunan dokumen perencanaan PD
Penyusunan LKjIP
Penyusunan LPPD
Penyusunan Dokumen Kepegawaian
Penyusunan Dokumen
Penyusunan Dokumen Anggaran
Penyusunan LKPD dan LRA

- **BIDANG BITKAN**

Penyediaan Sarana Benih/Bibit Ternak dan Pakan Ternak, peningkatan mutu genetik ternak

- **BIDANG SARPRAS**

Penyediaan Prasarana Pertanian untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peternakan dan pelayanan Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner, serta pengawasan perizinan pelaksanaan kegiatan usaha peternakan

- **BIDANG KESEHATAN HEWAN**

Penyediaan layanan Kesehatan hewan melalui UPT Produksi dan Kesehatan Hewan, unit pelayanan klinik hewan dan laboratorium

- **BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

Penyediaan pelayanan Kesehatan Masyarakat veteriner untuk mencegah penyakit zoonosis melalui pelayanan pengawasan bahan asal hewan melalui RPH dan petugas Kesehatan hewan, serta KIE

CROSSCUTTING ISS-PD 1 DENGAN ANTAR BIDANG PENGAMPU



CROSSCUTTING ISS-PD 1 DENGAN ANTAR BIDANG PENGAMPU



- **BIDANG BITKAN**

Penyediaan Sarana Benih/Bibit Ternak dan Pakan Ternak, peningkatan mutu genetik ternak

- **BIDANG SARPRAS**

Penyediaan Prasarana Pertanian untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peternakan, pelayanan Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner, serta pengawasan perizinan pelaksanaan kegiatan usaha peternakan

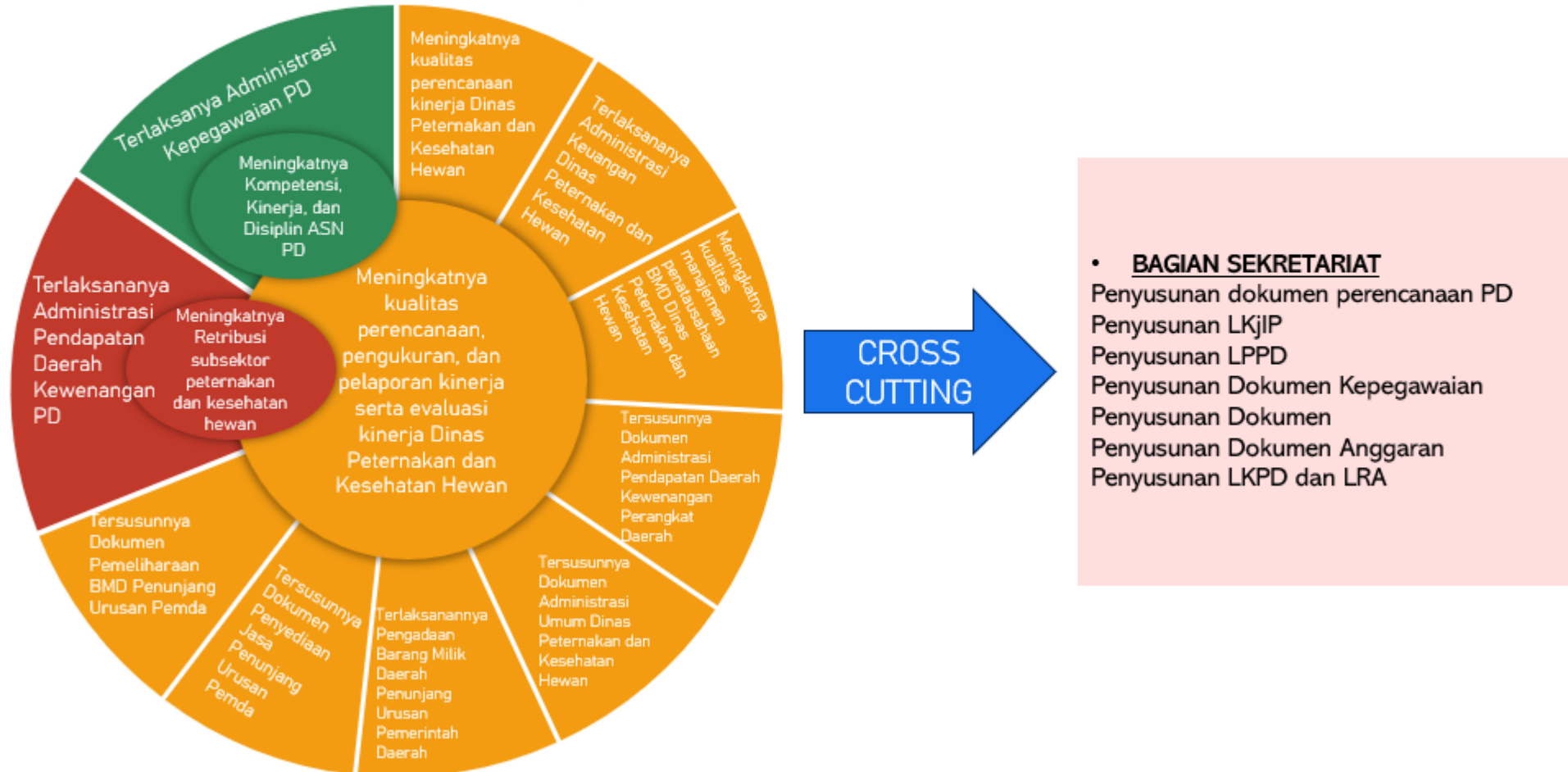
- **BIDANG KESEHATAN HEWAN**

Penyediaan layanan Kesehatan hewan melalui UPT Produksi dan Kesehatan Hewan, unit pelayanan klinik hewan dan laboratorium

- **BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

Penyediaan pelayanan Kesehatan Masyarakat veteriner untuk mencegah penyakit zoonosis melalui pelayanan pengawasan bahan asal hewan melalui RPH dan petugas Kesehatan hewan, serta KIE

CROSSCUTTING ISS-PD 2, ISS-PD 3, DAN ISS-PD 4 DENGAN BIDANG PENGAMPU



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada dokumen rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sumbawa Tahun 2026, difokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang mendukung ketahanan pangan dengan mengoptimalkan peningkatan ketersediaan prasarana peternakan, Penurunan kejadian dan jumlah kasus hewan Menular, peningkatan penanganan areal yang terdampak wabah penyakit ternak dan peningkatan jumlah pelaku Usaha subsektor Peternakan yang berizin, serta peningkatan nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sumbawa. Program dan kegiatan tahun 2026 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Perizinan Usaha Pertanian
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan rencana pendanaan dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten sumbawa tahun 2026 dirincikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2026		2027	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
BIDANG URUSAN PERTANIAN SUB SEKTOR PETERNAKAN							31.062.021.291		35.113.664.926
	X.XX.01 Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota						14.981.480.591		16.121.953.229
				Nilai AKIP PD	Nilai	82,5	14.975.995.341	83,5	16.116.050.412
				Indeks Profesionalitas ASN PD	Nilai	76,1	1.319.476	77,3	1.419.922
				Laju retribusi sub sektor Peternakan	%	3%	4.165.774	3%	4.482.895
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disusun	Dokumen	15	82.171.875	15	88.427.249
			X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Dokumen	2	2.290.502	2	2.464.868
			X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	20.747.545	1	22.326.962
			X.XX.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1.349.635	1	1.452.377
			X.XX.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.026.716	1	3.257.126
			X.XX.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.312.259	1	1.412.156
			X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.065.277	1	3.298.623

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2026		2027	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
			X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	Laporan	4	15.023.645	4	16.167.328
			X.XX.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup PD	Data	4	35.356.295	4	38.047.810
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan PD		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dokumen	104	11.769.110.912	105	12.665.040.315
			X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	100	11.617.567.879	101	12.501.960.993
			X.XX.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	144.897.830	1	155.928.249
			X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.718.121	1	4.001.165
			X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	2	2.927.082	2	3.149.908
		X.XX.01.2.03 Administrasi BMD pada PD		Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disusun	Dokumen	2	1.287.162	2	1.385.148
			X.XX.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan BMD SKPD	Dokumen	1	429.054	1	461.716
			X.XX.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Laporan	1	858.108	1	923.432
		X.XX.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD yang disusun	Laporan	1	4.165.774	1	4.482.895
			X.XX.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	4.165.774	1	4.482.895
		X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PD		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	Dokumen	1	1.319.476	1	1.419.922

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2026		2027	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
			X.XX.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Dokumen	1	1.319.476	1	1.419.922
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum PD		Jumlah Dokumen Administrasi Umum pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dokumen	5	247.115.735	5	265.927.542
			X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.117.343	1	6.583.029
			X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.294.702	2	1.393.262
			X.XX.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	13.483.333	1	14.509.758
			X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	226.220.357	1	243.441.494
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan barang milik daerah	Unit	43	800.472.528	44	861.408.896
			X.XX.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	445.096.345	2	478.979.525
			X.XX.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	41	355.376.183	42	382.429.371
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disusun	Dokumen	25	820.704.248	25	883.180.766
			X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	15.521.882	1	16.703.494
			X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	257.432.420	12	277.029.590

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2026		2027	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
			X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	547.749.946	12	589.447.682
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda		Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Dokumen	88	1.255.132.882	90	1.350.680.495
			X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	86	206.429.241	88	222.143.769
			X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	1.048.703.641	2	1.128.536.726
							10.909.464.000		13.407.384.985
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1. Cakupan Sarana peralatan peternakan yang digunakan/ dimanfaatkan	%	56,00	210.960.563	66,92	270.855.522
				2. Cakupan penyediaan Sarana bibit/benih ternak dan pakan yang berkualitas	%	53,63	10.698.503.437	64,59	13.136.529.463
		3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana peternakan	Laporan	8	210.960.563	8	270.855.522
			3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	4	20.000.000	4	60.000.000
			3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	190.960.563	4	210.855.522
		3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah ternak ditingkatkan sumber daya genetik	Dokumen	12	22.361.500	12	27.483.548
			3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	12	22.361.500	12	27.483.548

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2026		2027	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		3.27.02.2.03.Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kab/Kota		Jumlah benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan yang berkualitas	Laporan	48	10000000	48	12417986
			3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	48	10.000.000,00	48	12417986
		3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	17	10.666.141.937	17	13.096.627.930
			3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit	Laporan	12	256.370.937	12	314.721.434
			3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Laporan	1	10.399.771.000	1	12.761.906.496
			3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Laporan	4	10.000.000,00	4	20.000.000
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			Tingkat ketersediaan prasarana peternakan sesuai standar	%	50,97	262.416.043	62,62	316.789.877
		3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah prasarana peternakan yang dibangun, direhab, dan dipelihara tahun n	Unit	1	118.087.219	1	142.555.445
			3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	118.087.219	1	142.555.445
		3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/kota	Laporan	12	104.966.417	12	126.715.951
			3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Laporan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan	Laporan	12	104.966.417	12	126.715.951

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2026		2027	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		3.27.03.2.04 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum		Jumlah Luas lahan penggembalaan umum	Ha	2	39.362.406	2	47.518.482
			3.27.03.2.04.0001 Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	Ha	1	32.001.636	1	38.632.526
			3.27.03.2.04.0003 Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Ha	1	7.360.770	1	8.885.956
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						4.493.043.557		4.794.210.185
				1. Cakupan pelayanan kesehatan hewan	%	30,63	4.252.000.000	33,69	4.626.706.885
				2. Cakupan pelayanan kesehatan Masyarakat veteriner	%	40,44	241.043.557	55,11	167.503.300
		3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Laporan	12	157.000.000	12	167.503.300
			3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	12	157.000.000	12	167.503.300
		3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	190.000.000	12	202.711.000
			3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	12	190.000.000	12	202.711.000
		3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		jumlah Laporan pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Laporan	24	3.905.000.000	24	4.256.492.585

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2026		2027	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
			3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	12	280.000.000	12	303.822.514
			3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	12	3.625.000.000	12	3.952.670.071
		3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah laporan penerapan dan pengawasan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Laporan	3.527	241.043.557	3.896	167.503.300
			3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	12	58.543.557	12	40.682.436
			3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	2	20.000.000	2	13.898.177
			3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Laporan	7	87.500.000	7	60.804.524
			3.27.04.2.04.0006 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Dokumen	3.500	15.000.000	3.850	10.423.633
			3.27.04.2.04.0007 Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	6	60.000.000	25	41.694.530
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			Cakupan pengendalian dan penanggulangan hewan terdampak wabah penyakit hewan yang bersifat zoonosis	%	70	348.625.100	70	379.537.850
		3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit ternak	Laporan	12	348.625.100	12	379.537.850

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2026		2027	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
			3.27.05.2.01.0004 Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Hewan yang tanggulangi yang terdampak Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Laporan	12	348.625.100	12	379.537.850
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			Tingkat Kepatuhan Perizinan pelaku usaha sub sektor peternakan (PUSSP)	%	100	66.992.000	100	93.788.800
		3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Laporan	24	42.195.000	24	59.073.000
			3.27.06.2.02.0003 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	Laporan	12	23.241.000	12	32.537.400
			3.27.06.2.02.0005 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Laporan Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	Laporan	12	18.954.000	12	26.535.600
		3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan		Jumlah Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Laporan	12	24.797.000	12	34.715.800
			3.27.06.2.03.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Laporan	12	24.797.000	12	34.715.800

BAB V PENUTUP

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 ini merupakan sebuah rencana kerja ideal yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026, baik dari sisi indikator, target serta indikasi pendanaan. Maka kualitas atau kuantitas kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai sumberdaya sebagai input, di antaranya anggaran. Dalam konsepsi sumber daya organisasi, tata kelola sebuah organisasi pemerintahan tentu melibatkan berbagai sumberdaya yang merupakan aset organisasi tersebut, misalnya konsep “5m+1i” (Man; Money; Material; Machine; Methode; Information), dimana 5m tersebut adalah sumber daya fisik yang berwujud, sedangkan informasi merupakan sumber daya konseptual. Sumber daya konseptual ini dipakai oleh para penyelenggara pemerintahan untuk mengelola sumber daya fisik. Sumber daya informasi bukan hanya informasi dan data, tetapi juga terkait dengan sejumlah peralatan pendukungnya seperti perangkat keras dan lunak komputer, *database*, jaringan, dan lain-lain.

Sumber daya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, secara terus menerus di tata ulang agar siap pakai terutama ketika terjadi suatu perubahan agar tetap dapat cepat beroperasi dan selalu dapat menghasilkan daya guna atau manfaat yang lebih tinggi atau semakin baik. Misalnya pelatihan pegawai, yang merupakan usaha untuk memperbaiki sumber daya manusia, penggantian mesin lama dengan mesin baru yang lebih modern. Semua usaha tersebut ditujukan untuk memaksimalkan penggunaan tiap sumber daya, meminimalkan waktu yang terbuang, serta mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas setiap unit kerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang optimal, harus diupayakan tersedia atau terpenuhinya seluruh sumber daya yang berkesesuaian. Tidak hanya dalam hal ketersediaan, namun tata kelola atau manajemen yang baik atas seluruh sumber daya yang dimiliki turut serta mempengaruhi tingkat keberhasilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 ini disusun sesuai amanat perundang-undangan yang terkait dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a) Bahwa Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 merupakan implementasi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan sesuai kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa;
- b) Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, dengan mengacu kepada RKPD Tahun 2026 Kabupaten Sumbawa.

Akhirnya, dibutuhkan suatu rencana tindak lanjut yang tepat dan terarah atas seluruh hal yang telah direncanakan dalam dokumen ini. Perencanaan yang baik merupakan setengah dari keberhasilan, maka dengan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan semua program, kegiatan hingga sub kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan pada tahun berkenaan. Dengan terlaksananya seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan diharapkan akan tercapai tujuan, sasaran, manfaat, hasil, dan keluaran melalui tata kelola anggaran yang lebih akuntabel, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik dan lebih cepat.

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT